



KPU Jabar Fokus pada Peningkatan Komunikasi dan Evaluasi Jelang Penetapan Calon Pilkada 2024

KPU Jabar Tekankan Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024



BANDUNG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni menekankan, pentingnya komunikasi secara efektif yang dilakukan oleh setiap sektor khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan.

Hal itu disampaikan Ummi Wahyuni saat memimpin Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

“Semua kegiatan seharusnya semua itu mengetahui, bukan hanya pada lini sektor masing-masing kegiatan,” ucap Ummi di Kantor KPU Jabar, Kamis (12/9/2024).

Ummi mengatakan, hal ini berdasarkan contoh kasus di beberapa daerah pada saat tahapan verifikasi administrasi.

“Divisi teknis atau ketua tidak tahu hari ini teman-temannya sedang ke mana? Nah ini kan menjadi sebuah potensi permasalahan, karena ketika nanti ada permasalahan yang dipermasalahkan adalah kelembagaan bukan person to person,” katanya.

Oleh karena itu, Ummi kembali menekankan pentingnya komunikasi yang efektif. Mengingat, saat ini proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tengah memasuki tahapan-tahapan krusial.

“Hari ini teman-teman ketua dan seluruh anggota masih dalam proses verifikasi pencalonan berkas perbaikan, kabupaten/kota hari ini termasuk provinsi sedang melakukan verifikasi untuk perbaikan calon kepala daerah masing-masing,” ungkapnya.

Selain itu, Ummi juga meminta agar rapat pleno di setiap sektor dilaksanakan setiap pekannya. Hal ini sebagai langkah evaluasi dan persiapan yang akan dilakukan ke depannya.

“Kami tidak ingin mendengar misalnya karena sibuknya hari ini sehingga kita tidak melakukan rapat pleno disektor masing-masing, ini jadi sebuah penegasan bagi para ketua bagaimana mengatur minimal 1 minggu sekali untuk kita melakukan rapat pleno,” katanya.

“Karena rapat pleno itu adalah mengevaluasi 1 minggu sebelumnya dan melakukan persiapan untuk satu minggu kedepan,” lanjutnya.

Ummi juga mengingatkan, setiap

pengambilan kebijakan harus diputuskan melalui rapat pleno.

“Mengingatkan kembali para ketua di tengah berisannya kegiatan hari ini, untuk kembali pada tata kelola organisasi kita menempatkan pengambilan kebijakan tertinggi itu ada di rapat pleno,” imbuhnya.

Ummi mengatakan, pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota yang lolos verifikasi akan ditetapkan pada 22 September 2024 sebagai peserta resmi Pilkada 2024.

beberapa narasumber.

“Kegiatan ini kita laksanakan pada hari ini, Kamis 12 September tahun 2024, nanti akan ada materi yang akan disampaikan oleh narasumber,” ucap Hasanuddin.

Hasanuddin menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

“Kita ketahui bersama saat ini ada peralihan tugas di bidang hukum yang awalnya di bagian hukum dan SDM kemudian saat ini sesuai dengan surat edaran dari Pak Sekjen itu beralih ke Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sampai dengan ditetapkannya



“Kami sangat berharap rekan-rekan hari ini juga memanfaatkan waktu sampai di tanggal 22, karena kami juga harus menyesuaikan bagaimana penyesuaian jadwal kegiatan di provinsi itu harus linear juga dengan kegiatan di KPU RI,” katanya.

Oleh karena itu, Ummi berharap para anggotanya bisa mengatur ritme dengan tidak meninggalkan apa yang harus dilakukan di sektor masing-masing kabupaten/kota.

“Artinya ketika misalnya ketua hari ini punya kegiatan yang berisiran tetapi tidak meninggalkan kegiatan yang hari ini tahapannya sudah berlangsung, tahapan verifikasi dokumen perbaikan ini terus harus tetap dilakukan,” kata Ummi.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Hukum KPU Jabar, Hasanuddin Ismail mengatakan, rapat koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Jabar dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dilaksanakan di kantor KPU Jabar dengan menghadirkan

pejabat definitif sesuai dengan PKPU 21 tahun 2023,” kata Hasanuddin.

“Sehingga itu perlu bagi kami yang memberikan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan dan pengembangan JDIH, palagi JDIH merupakan ikon dari KPU Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.

Hasanuddin mengatakan, rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh ketua KPU kabupaten/kota di Jabar beserta dengan divisi hukum dan pengawasan.

“Terima kasih banyak sudah berkenan hadir semuanya di tengah padatnya kegiatan masih menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini,” ujarnya.

Adapun yang bertindak sebagai narasumber diisi oleh tenaga ahli Ketua KPU RI yang akan menyampaikan materi mengenai kebijakan pengelolaan dan pengembangan JDIH KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

“Kemudian nanti ada juga pameri dari operator JDIH KPU RI, yang akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana tata cara publikasi dilaman JDIH dan tata cara pembuatan abstrak keputusan,” pungkasnya.

